

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Tribunnews.com
Media Cetak	

# DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Sepakati KUA-PPAS APBD 2025 Sebesar Rp 91,1 Triliun

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho

DPRD dan [Pemprov DKI Jakarta](#) menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) [APBD](#) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pj Gubernur DKI Jakarta [Teguh Setyabudi](#) dengan Ketua [DPRD DKI Jakarta](#) Khoirudin bersama tiga wakil lainnya, yakni Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Basri Baco.

Khoirudin mengatakan, penandatanganan MoU sebagai bentuk komitmen untuk memastikan setiap alokasi anggaran sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2025, telah menyepakati sejumlah program prioritas, di antaranya dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

"Kami telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah," kata Khoirudin usai rapat paripurna di gedung [DPRD DKI Jakarta](#), Jumat (1/11/2024).

Dengan penandatanganan MoU, tegas dia, program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan terealisasi pada Juli 2025.

"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta," ucap Khoirudin.

Politisi PKS itu menuturkan bahwa kolaborasi antara DPRD dan Pemprov sangat penting dilakukan.

Tujuannya, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Tak lupa, ia juga mengajak masyarakat terlibat memberikan masukan untuk pembangunan Kota Jakarta.

Sehingga, dapat mewujudkan pembangunan Jakarta yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

"Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan ini agar semua program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta," tutur Khoirudin. (faf)